



PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM E-GOVERNMENT SERTA PENTINGNYA KOMITMEN

munir@upi.edu

**Seminar TI di Pemerintahan Kabupaten Bandung,
Rabu, 20 Desember 2006**

2 0 0 6

PENGANTAR

- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi dapat menghantarkan peran dan fungsi organisasi menjadi semakin luas dan luwes.
 - Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu organisasi dalam meningkatkan produktivitas, efektivitas, efisiensi dan kesejahteraan.
 - Teknologi informasi dan komunikasi dapat mengetahui proses menemukan masalah, membantu menyelesaikan masalah, dapat memperkirakan beberapa pilihan penyelesaian masalah, mengimplementasikan penyelesaian dengan berhasil dan menyebarkan hasil dari penyelesaian tersebut.
- TIK dalam sistem pemerintahan hadir sebagai sebuah alat bantu untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan sehingga terwujud roda/tata pemerintahan yang baik (good governance).

MEWUJUDKAN KOMITMEN DALAM GOOD GOVERNANCE

Government istilah pemerintah.

Governance merupakan tata pemerintahan.

Good governance adalah tata pemerintahan yang baik.



FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEBIJAKAN PUBLIK TIDAK BERDAMPAK

- **Sumber-sumber pendukung kebijakan tidak memadai/mencukupi**
- **Cara yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan lamban hingga mengurangi dampak.**
- **Masalah-masalah publik ditentukan oleh banyak faktor, sementara pelaksanaan kebijakan hanya ditujukan kepada satu atau beberapa masalah**
- **Prilaku dalam menanggapi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan publik yang kurang tepat**
- **Tujuan kebijakan yang tidak sebanding dan bertentangan satu sama lain.**
- **Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah lebih besar dibanding dengan masalah yang dihadapi**
- **Banyak masalah publik yang tidak mungkin dapat diselesaikan, secepat yang diharapkan.**
- **Sifat masalah yang holistik perlu dipecahkan secara holistik.**

PERANAN TIK DALAM GOOD GOVERNANCE

Inpres 6/2001 menyebutkan tentang peranan TIK dalam upaya penegakan *good governance* bahwa melalui penerapan jaringan informasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu telah menjadi prasyarat yang penting untuk mencapai *good governance* dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan guna antara lain memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah, serta mengurangi berbagai kemungkinan kebocoran anggaran.

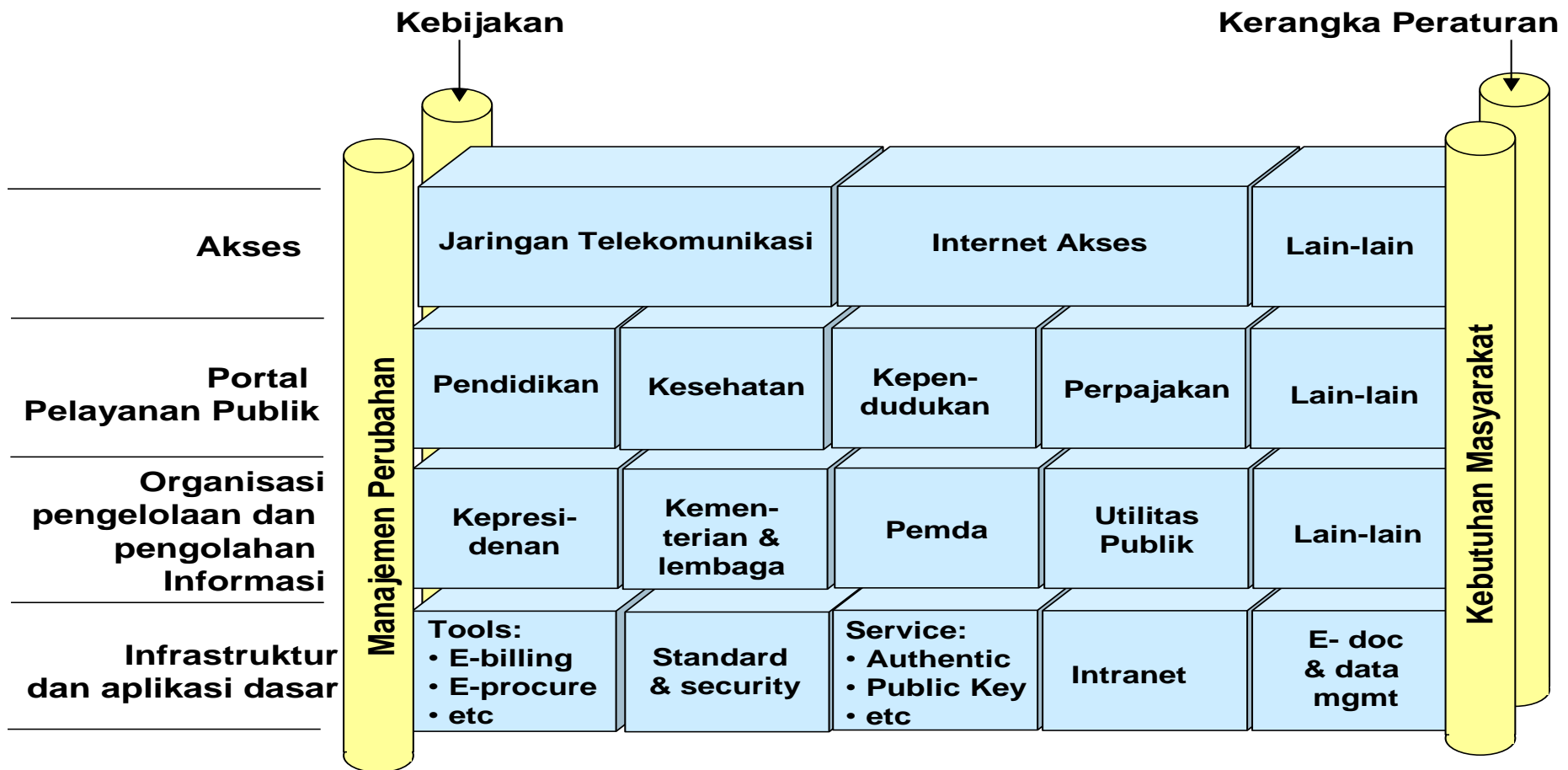
Salah satu peran TIK adalah lahirnya **E-GOVERNMENT**

Strategi Pengembangan e-Government (Inpres 3 tahun 2003)

- 1) Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas**
- 2) Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah Pusat dan Daerah secara holistik**
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal**
- 4) Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi**
- 5) Pengembangan sumberdaya manusia di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat**
- 6) Pelaksanaan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur**

Kerangka Arsitektur e-Government

Inpres 3/2003



MEWUJUDKAN AMANAT E-GOVERNMENT INPRES NOMOR 3 TAHUN 2003

- Mewujudkan manfaat nyata e-Government, terutama bagi masyarakat (termasuk dunia usaha)
- Komitmen dari Pimpinan Instansi (e-Leadership)
- Penyiapan rencana strategis pengembangan e-Government di setiap Instansi Pemerintah, mengacu kepada Strategi Pengembangan e-Government Nasional
- Penyusunan Kebijakan, Standar dan Panduan
- Implementasi melalui pilot proyek

KONDISI PENERAPAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH PUSAT

- 90% memiliki Website
- 6% menggunakan nama domain di luar go.id
- 87,9% menyediakan fasilitas interaktif seperti search engine
- 16,7% menyediakan fasilitas download, chatting rooms/forum dan kontak e-mail
- 1,5% menyediakan layanan melalui website
- 84,3% masih berada di tahap I (Persiapan)
- 16,7% berada di tahap II (Pematangan)

KONDISI PENERAPAN E-GOVERNMENT

DI PEMERINTAH DAERAH
49,9 % Memiliki website

Layanan Satu Atap di 13 Pemda
Layanan KTP dan KK di 21 Pemda
Layanan Akta kelahiran di 22 Pemda
Layanan Perkawinan di 21 Pemda
Layanan Kematian di 21 Pemda
Layanan Perceraian di 21 Pemda
Layanan IMB di 30 Pemda
Layanan Izin Tempat Usaha di 14 Pemda
Layanan Izin Galian C di 7 Pemda
Layanan Izin Reklame di 25 pemda
Layanan Izin Usaha Perdagangan di 20 Pemda
Layanan Tanda Daftar Industri di 15 Pemda
Layanan Tanda Daftar Perusahaan di 17 Pemda
Layanan Izin Lokasi di 7 Pemda
Layanan Izin Peruntukan Penggun Tanah di 5 Pemda
Layanan Izin Gangguan di 18 Pemda
Layanan Izin Trayek di 14 Pemda
Layanan Izin Usaha Pariwisata di 13 Pemda
Layanan Aplikasi Pengadaan di 1 Pemda
Layanan Aplikasi Keuangan di 5 Pemda
Layanan Aplikasi Kepegawaian di 5 Pemda
Layanan Aplikasi Aset Manajemen di 4 Pemda
Layanan Aplikasi Proyek Manajemen di 3 Pemda

PENUTUP

Meski secara umum kehadiran TIK di Indonesia dalam mendukung e-government untuk menciptakan *good governance* masih relatif rendah, namun demikian mengacu pada berbagai upaya yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar birokrat telah mengerti apa dan bagaimana *good governance*.

Permasalahan yang muncul dari kondisi semacam ini adalah adanya ketidak-komitmenan dan ketidak-pedulian di antara pejabat birokrasi tentang perlunya e-government dalam menciptakan *good governance*.

Dengan demikian, hambatan utama dalam penegakkan *good governance* bukan pada institusi, melainkan terletak pada sikap moral kita sendiri sebagai birokrat.